



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NTB

DOKUMEN

RENCANA STRATEGIS BLUD
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN (BPSDKP) WILAYAH BIMA-DOMPU
TAHUN 2024 - 2026



DAFTAR ISI

- Bab I : Pendahuluan**
- Bab II : Gambaran Umum Pelayanan**
- 1.1. Gambaran Umum UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu
 - 1.2. Gambaran BLUD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu
 - 1.3. Kinerja Pelayanan BLUD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu
- Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis**
- Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan**
- Bab V : Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan**
- Bab VI : Penutup**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Ridho dan Karunia-Nya Dokumen RENSTRA Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu dapat tersusun. Dokumen RENSTRA ini disusun sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

RENSTRA UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD merupakan peraturan dasar internal yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD, menggambarkan Standar Pelayanan Minimal yang menjadi pedoman pelaksanaan pelayanan yang ada di Wilayah BPSDKP Bima-Dompu. RENSTRA UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD ini disesuaikan dengan tujuan pengelolaan BLUD yaitu meningkatkan kinerja pelayanan melalui penerapan praktek bisnis yang sehat, yaitu pengelolaan manajemen yang baik, bermutu dan berkesinambungan. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbaikan di dalam RENSTRA Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD maka dokumen ini akan dilakukan penyempurnaan kembali.

Mataram, Januari 2023
Kepala BLUD BPSDKP Wilayah
Bima-Dompu
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ir. Edy Suparto Saba, M.Si

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan pada level provinsi berdasarkan kewenangan pada pasal 27 undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi.

Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu provinsi kepulauan di Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar dan belum terkelola secara optimal. Salah satu strategi pengelolaan wilayah perairan yang telah dilakukan adalah melalui pengalokasian ruang laut untuk Konservasi Perairan Daerah (KKD). Kawasan Konservasi Perairan Daerah dihajatkan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pengembangan kawasan konservasi perairan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah ini telah menjadi Program Nasional yang dinilai penting dilaksanakan untuk menjaga dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan. Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan ini menjadi salah satu indikator kinerja KKP dalam Sasaran Strategis ke-3 (SS-3) mengenai Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) telah menetapkan enam kawasan konservasi daerah dari total 12 kawasan yang telah dicadangkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, diantaranya kawasan konservasi Gili Sulat Lawang dan Gita Nada di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat, Kawasan Konservasi Liang Ngali dan Gili Balu di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, dan Kawasan Konservasi Gili Banta dan Teluk Cempi di Kabupaten Bima dan Dompu. Lokasi Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi NTB terlihat pada Gambar 1 berikut ini :

Gambar 1. Peta Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi NTB



Untuk mengelola kawasan konservasi di perairan tersebut di atas, Pemerintah Provinsi NTB membentuk 3 Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP) melalui Peraturan Gubernur No.3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu, UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat, dan UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok. UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ini melaksanakan tugas operasional teknis dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil sekaligus pengawasan pemanfaatan ruang laut dan perizinan usaha kelautan dan perikanan, dimana salah satunya mempunyai wewenang mengelola Kawasan Konservasi di wilayah kerja masing – masing.

Akan tetapi dalam perjalanan pelaksanaan tugasnya, UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ini masih terkendala faktor dana operasional, sumberdaya manusia, benturan regulasi dalam pengelolaan wilayah dengan Kabupaten dan lainnya. Dengan mempertimbangkan karakteristik tugas, fungsi UPTD BPSDKP maka perlu ruang dalam pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel dan mandiri.

Berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Permendagri 79 Tahun 2018 point c, UPTD BPSDKP dapat menerapkan Badan Layanan Umum Daerah. Kehadiran BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu ini diharapkan mampu mengelola kawasan konservasi dimaksud serta melindungi dan melestarikan potensi sumber daya ikan dan lingkungannya, yang memberikan dampak untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Agar pengelolaan BLUD secara maksimal dan efektif, BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu perlu menyusun Rencana Strategis.

BPSDKP Wilayah Bima-Dompu di dalam dokumen ini meliputi seluruh Kawasan Konservasi perairan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kementrian Kelautan dan Perikanan melalui Permen KP Nomor : 31/PERMEN- KP/ 2020. Meliputi kawasan konservasi perairan Taman Wisata Perairan (TWP) Gilibanta Nomor 21/KEPMEN-KP/2020 tentang KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GILI BANTA DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dan Suaka Alam Perairan (SAP) Teluk Cempi Nomor 22/KEPMEN-KP/2020 tentang KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN TELUK CEMPI DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dan daerah pencadangan TWP Pulau Kelapa dan TWP Pulau Sangiang.

Adapun luas kawasan konservasi yang di kelola oleh UPTD BPSDKP Wilayah Bima_Dompu:

1. TWP Gilibanta 40.500 Ha
2. SAP Teluk Cempi 22.487,31 Ha
3. TWP Pulau Sangian 48.610,01 Ha
4. TWP Pulau Kelapa 6.947,28 Ha

Jumlah Luas Kawasan Konservasi yang dikelola yaitu 118.544,6 Ha

Kawasan Konservasi wajib memiliki zonasi kawasan konservasi, yang meliputi:

1. zona inti;
2. zona pemanfaatan terbatas;
3. zona lain sesuai peruntukan kawasan

Kawasan konservasi di wilayah Bima – Dompu memiliki beragam potensi dari berbagai aspek yang luar biasa, baik aspek kepariwisataan maupun dari aspek ekonomi. Maka sudah selayaknya manajemennya pun harus memadai, guna menciptakan *output* dan *impact* konstruktif yang beragam sesuai dengan ragam potensi yang dimilikinya. Maka berdasarkan berbagai potensi-potensi tersebut, kawasan-kawasan ini sejatinya mendapat sentuhan manajemen yang maksimal dan terintegrasi agar kemanfaatan wilayah tersebut dirasakan manfaatnya oleh public.

1.2. Pengertian Rencana Strategis BLUD

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), disebutkan rencana strategis BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu yang baru ditetapkan pada tahun 2023 dalam penyusunan Renstra, mengacu pada Perda Provinsi NTB Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 dan Renstra Dinas tahun 2019-2023, sehingga Renstra BLUD ini sesuai periode RPJMD dan Renstra Dinas.

Renstra BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu memuat antara lain:

1. rencana pengembangan layanan;
2. strategi dan arah kebijakan;
3. rencana program dan kegiatan; dan
4. rencana keuangan.

1.3. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis BLUD

Renstra ini disusun dengan maksud agar dapat dijadikan panduan operasional BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya sebagai pengelola wilayah perairan dan Kawasan Konservasi. Periode perencanaannya disesuaikan dengan masa berlaku, visi dan misi RPJMD, dan Renstra Dinas, sehingga arahan kebijakan dalam RPJMD dan Renstra Dinas dapat diimplementasikan melalui program dan kegiatan di bidang pengelola wilayah perairan dan Kawasan Konservasi pada BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu.

1.4. Dasar Hukum Rencana Strategis

Dasar hukum untuk menyusun Renstra ini, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 Tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
15. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023;
16. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Konservasi TWP Gili Sulat dan Gili Lawang di Kabupaten Lombok Timur.
18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Konservasi TWP Gili Tangkong, Gili Nanggu, Gili Sudak, dan perairan disekitarnya di Kabupaten Lombok Barat.
19. Inmendagri 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru

1.5. Perubahan Rencana Strategis

Rencana Strategis ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana strategis sebagaimana disebutkan diatas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan BLUD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu serta perubahan lingkungan strategis.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1. Gambaran Umum UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu

Tugas pokok UPTD **Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu** sebagaimana Peraturan Gubernur NTB Nomor 3 Tahun 2023 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 90 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis perlindungan, pemanfaatan serta pelestarian wilayah pengelolaan kawasan konservasi perairan di Wilayah Bima-Dompu

Sedangkan fungsi UPTD, sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
- b. pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD;
- c. penyiapan bahan dan petunjuk teknis serta prosedur perlindungan pemanfaatan dan perairan konservasi;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap habitat dan Jenis ikan serta biota lainnya pada seluruh kawasan perairan Wilayah Lombok termasuk Kawasan Konservasi yang berada di Wilayah Bima-Dompu;
- e. pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. perlindungan terhadap aturan zonasi di Kawasan perairan Wilayah Lombok
- g. pengkoordinasian pengawasan, pemanfaatan sumber daya perlindungan pada Kawasan perairan Wilayah Bima-Dompu;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sumber daya kelautan dan perikanan di Kawasan perairan Wilayah Lombok;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas secara berkala; dan
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Substansi layanan UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Bima-Dompu adalah pengelolaan Kawasan perairan yang berada di seluruh Wilayah Bima-Dompu. Bentuk layanan yang diberikan disesuaikan dengan standar pelayanan minimal (SPM), adalah:

1. Layanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan termasuk kawasan Konservasi;
2. Layanan pengawasan dan pemantauan pemanfaatan Kawasan termasuk kawasan Konservasi;
3. Layanan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat; dan
4. Layanan penyadartahuan dan penyediaan informasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan seluruh kawasan termasuk kawasan konservasi secara berkelanjutan.

Pelayanan tersebut diberikan dengan mengacu pada Rencana Zonasi pengelolaan

wilayah perairan yang termasuk didalamnya Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan. Zonasi Kawasan Konservasi adalah batas-batas fungsional di Kawasan Konservasi yang ditetapkan sesuai dengan potensi sumber daya hayati, non-hayati, dan sosial budaya beserta daya dukung lingkungan. Zonasi Kawasan Konservasi secara umum meliputi zona inti yang ditujukan untuk perlindungan mutlak terhadap target konservasi, zona pemanfaatan terbatas yang ditujukan untuk kegiatan perikanan dan pariwisata secara berkelanjutan, serta zona lain sesuai peruntukan kawasan.

Layanan umum dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk pelayanan dalam konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut berhubungan dengan:

1. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum berkaitan dengan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ruang laut pada Kawasan Konservasi namun, tidak termasuk penyediaan jasa layanan umum yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi perizinan tertentu dan perizinan. Dalam melakukan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum tersebut UPTD dapat menjadi penyedia dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan Praktik Bisnis Yang Sehat sebagai salah satu bentuk pengembangan layanan umum.
2. Pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada Masyarakat. Pengelolaan dana khusus ini meliputi dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah; dan/atau dana perumahan.
3. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Kawasan tertentu tersebut dalam hal ini adalah Kawasan Konservasi.

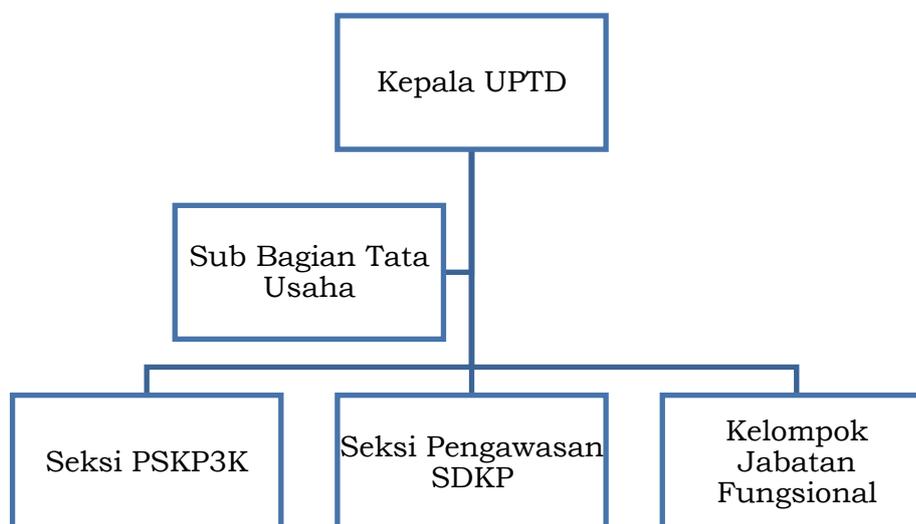
Batasan minimal atau ambang batas mengenai jenis dan mutu layanan berkaitan dengan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang harus dipenuhi oleh UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu dituangkan dalam SPM, dan SPM ini diperlukan dalam penyusunan RBA.

2.2. Gambaran Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu

A. Struktur Organisasi UPTD

Pejabat Pengelola UPTD **Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu** yang telah menerapkan BLUD terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis. Pejabat teknis ini mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya. Struktur Organisasi UPTD **Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu** sesuai Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dalam pergub no. 3 tahun 2023 tentang perubahan kedua (sebagaimana pada Gambar 16), terdiri dari:

1. Kepala UPTD;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kepala Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
4. Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu

Dalam pengelompokan fungsi pada Pola Tata Kelola UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian tujuan. UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu yang menerapkan BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. Pejabat Pengelola UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu yang menerapkan BLUD bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan dalam pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.

Uraian tugas masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPTD mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan kebijakan strategis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - b. Membantu memfasilitasi pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi, penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
 - c. Membantu melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. Membantu memfasilitasi proses perizinan dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak bumi dan gas;
 - e. Melaksanakan pengawasan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil di wilayah kerjanya;
 - f. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya;
 - g. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya;

- h. Melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

2. Kasubbag Tata Usaha

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, rencana strategis, RKA DPA kegiatan Subbag TU;
 - b. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, E-Kinerja, LKPJ, LPPD, laporan kegiatan Sub bagian TU dan Laporan tahunan;
 - c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, arsip dan perlengkapan kantor;
 - d. Menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan prioritas sesuai RPJMD Renstra;
 - e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, pengelolaan barang atau atau asset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis;
 - f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, meliputi: Pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, Bahan kenaikan pangkat, bahan pensiun dan mutasi, Penyiapan dan pengurusan administrasi cuti.
 - g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan: kenaikan gaji berkala, perjalanan dinas, keuangan dan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengumpulan dan mengolah data untuk: Bahan penyusunan analisa data dan informasi serta evaluasi program, Bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
 - i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan
3. Kepala Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, rencana strategis, RKA DPA kegiatan seksi;
 - b. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, E-Kinerja, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan seksi;
 - c. Menyiapkan bahan pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk kawasan konservasi di Wilayah Kerjanya;
 - d. Melaksanakan penyediaan sarana prasarana pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerjanya;
 - e. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pendayagunaan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerjanya;
 - f. Menyiapkan bahan mitigasi bencana alam dan kerusakan lingkungan perairan di Wilayah Kerjanya;

- g. Menyiapkan bahan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerjanya;
- h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan;
4. Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Menyiapkan bahan rumusan rencana kerja, rencana strategis, RKA DPA kegiatan seksi ;
 - Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, E-Kinerja, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan seksi;
 - Menyiapkan bahan penyusunan rencana operasional pengawasan;
 - Menyiapkan bahan kegiatan penguatan kelembagaan, pengembangan sarana dan prasarana pengawasan serta pelayanan dan informasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan pengawasan di perairan umum di wilayah kerjanya;
 - Melaksanakan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerjanya;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Sumber Daya UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu

1. Sumber Daya Manusia / Pegawai

SDM/Pegawai di UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu dapat terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Profil dan Kebutuhan SDM Pegawai UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu Tahun 2023

1	Kepala UPTD	PNS Pembina (IV/b)	1	1	Wilayah Bima-Dompu
2	Kasubag TU	PNS Penata Tk I (III/d)	1	1	Wilayah Bima-Dompu
	a. Koordinator Administrasi, Kepegawaian dan Logistik	ASN/Non ASN	0	0	
	1) Staf Administrasi Umum	ASN/Non ASN	3	3	Wilayah Bima-Dompu
	2) Staf Kepegawaian	ASN/Non ASN	0	1	Wilayah Bima-Dompu
	3) Staf logistik	ASN/Non ASN	0	0	
	b. Koordinator Keuangan	ASN/Non ASN	0	0	
	1) Akuntan	ASN/Non ASN	0	1	Wilayah Bima-Dompu
	2) Bendahara Pengeluaran	ASN	1	1	Wilayah Bima-Dompu
	3) Bendahara Pendapatan	ASN	0	1	Wilayah Bima-Dompu
	c. Koordinator Pemanfaatan Jasa Lingkungan	ASN/Non ASN	0	0	
	1) Staf Pemanfaatan Jasa Lingkungan	ASN/Non ASN	0	0	

	d.Koordinator Teknis	ASN/Non ASN	0	0	
	1)Staf Teknis Bio-ekologi	ASN/Non ASN	0	1	Wilayah Bima-Dompu
	2)Staf Teknis Sosekbud	ASN/Non ASN	0	1	Wilayah Bima-Dompu
	e.Koordinator Komunikasi	ASN/Non ASN	0	0	
	1)Staf Admin Website/Sosmed	ASN/Non ASN	0	0	
	2)Staf Penjangkauan	ASN/Non ASN	0	0	
	3)Staf Pengelolaan Data & Informasi	ASN/Non ASN	0	1	
	4)Staf Branding & Promosi	ASN/Non ASN	0	0	
3	Kepala Seksi Wilayah	ASN	2	2	Wilayah Bima-Dompu
	1)Staf pengawasan/ Jaga Laut	ASN/Non ASN	0	4	Wilayah Bima-Dompu
	2)Staf penyuluhan	ASN/Non ASN	0	4	Wilayah Bima-Dompu
	3)Staf Pemantauan sumberdaya kawasan	ASN/Non ASN	0	1	Wilayah Bima-Dompu
	4)Nahkoda speed boat	Non ASN	0	3	Wilayah Bima-Dompu
	5)Asisten Administrasi	Non ASN	0	0	
	6)Asisten Logistik	Non ASN	0	0	
	7)Satpam	Non ASN	2	2	Wilayah Bima-Dompu
	8)Penjaga Pos Pengawasan	Non ASN	0	0	
	9)Office Boy	Non ASN	0	0	

2. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan di UPTD BPSDKP Wilayah Lombok dapat diikuti dalam tabel berikut.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Tahun 2020 dan 2021

Komponen	Nilai 31 Desember 2021	Nilai 31 Desember 2022	Keterangan
Penerimaan	0	0	Retribusi pelayanan
Kas dan setara kas	395.799.700	2.466.249.200	Belum ada penerimaan

Sumber: Laporan Keuangan UPTD Tahun 2021 dan 2022

3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sumber daya sarana prasarana di UPTD BPSDKP Wilayah Lombok dapat terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 3. Gambaran Sarana Prasarana s/d Tahun 2022

Komponen	Nilai 31 Desember 2022
Peralatan dan Mesin	662.143.731
Gedung dan Bangunan	279.253.000

Sumber: Laporan Keuangan UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu 2022 (angka yang ditampilkan adalah ilustrasi)

Tabel 4. Gambaran Sarana Prasarana s/d Tahun 2022

SPESIFIKASI BARANG Nama / Jenis Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
				Barang	Harga (Rp)	
Lemari Arsip 3 Pintu	Pembelian	2017	Baik	2 Unit		
Meja Kerja Eselon III	Pembelian	2017	Baik	1 Unit		
Meja Kerja Eselon IV	Pembelian	2017	Baik	3 Unit		
Meja Kerja ½ Biro Non Struktural	Pembelian	2017	Rusak Berat	6 Unit		
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Pembelian	2017	Baik	1 Unit		
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Pembelian	2017	Baik	3 Unit		
Kursi Kerja Staf	Pembelian	2017	Rusak Berat	6 Unit		
Kursi Lipat	Pembelian	2017	Baik	20 Unit		
Laptop	Pembelian	2017	Kurang Baik	2 Unit		
Printer	Pembelian	2017	Rusak Berat	1 Unit		
Kamera	Pembelian	2017	Baik	1 Unit		
Kendaraan Dinas Roda 2	Pembelian	2017	Baik	3 Unit		
Mobil Dinas	Pembelian	2017	Kurang baik	1 Unit		
Kantor BPSDKP BIDOM	Pembelian	2018	Baik	1 Unit		
Teropong	Pembelian	2018	Baik	1 Unit		
Baju Pelampung	Pembelian	2018	Baik	10 Unit		
GPS	Pembelian	2018	Baik	1 Unit		
Kamera Bawah Air	Pembelian	2018	Baik	1 Unit		
HT (Handie Talkie)	Pembelian	2019	Baik	10 Unit		
Mooring Buoy	Pembelian	2019	Baik	1 Paket		
Meja Rapat	Pembelian	2019	Baik	1 Unit		
Lemari Arsip	Pembelian	2019	Baik	1 Unit		
Kursi Tamu	Pembelian	2019	Baik	1 Unit		
Laptop	Pembelian	2019	Kurang Baik	2 Unit		
Printer	Pembelian	2019	Rusak berat	2 Unit		
Proyektor	Pembelian	2019	Baik	1 Unit		
Layar Proyektor	Pembelian	2019	Baik	1 Unit		
Sound System	Pembelian	2019	Baik	1 Unit		
Air Conditioner	Pembelian	2019	Baik	2 Unit		
TV	Pembelian	2019	Baik	1 unit		
Alat selam	Pembelian	2019	Baik	3 Set		
Alat Selam	Pembelian	2020	Baik	3 Set		

Sumber: Laporan Keuangan/asset/BMD UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu

Tabel 5. Gambaran Sarana Prasarana s/d Tahun 2021

Jenis Barang /			Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Ket.
----------------	--	--	---------------------	--------------	-----------	-------------------	------

Nama Barang	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Luas Lantai (M2)					
Pusat Informasi Kawasan KKPD Gili Banta Kabupaten Bima	Baik		Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima				
Sarana Pemeliharaan Biota Langka KKPD Nisa Bea Kabupaten Bima	Baik		Langgudu Kabupaten Bima	Tanah Hak Ulayat	Hibah		Hibah Bangunan Pemeliharaan Biota Langka Pokmaswas Nisa Bea dari UPTD BPSDKP Perairan Kaimana
Sarana Pemeliharaan Biota Langka, KKPD Oifanda Kabupaten Bima	Baik		Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima				Hibah Bangunan Pemeliharaan Biota Langka Pokmaswas Oifanda dari UPTD BPSDKP
Pondok Jaga KKPD Gilibanta	Baik		Kecamatan Sape Kabupaten Bima				

Sumber: Laporan Inventaris Barang UPTD BPSDK Wilayah Bima-Dompu 2021

a. Kinerja Pelayanan UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu

Sejak dibentuk hingga saat ini operasional UPTD sudah berjalan tahun kedua. Kinerja pelayanan dalam dua tahun terakhir mengalami dinamika, apalagi dengan adanya pandemi Covid-19, nyaris tugas-tugas dan fungsi pelayanan UPTD tidak berjalan secara normal, hanya kegiatan-kegiatan sifatnya rutin dan pelayanan kepegawaian. Dengan penerapan BLUD, diharapkan ke depan kinerja pelayanan UPTD diharapkan dapat berjalan efektif dan mampu menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan sesuai Tata Kelola, Renstra dan SPM yang telah disusun untuk mencapai hasil yang maksimal. Kinerja pelayanan dan evaluasinya didasarkan pada dokumentasi yang ada. Perlu dijelaskan kinerja terkait pengelolaan SDKP yang dilakukan baik secara mandiri maupun dengan mitra kerja (NGO,dll)

b. Kinerja Operasi

Pada tahun 2021, UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu memiliki tiga program antara lain;

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2) Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Terhadap ke tiga program ini, rata-rata pencapaian adalah 100%

Tabel 6. Capaian Kinerja Operasi UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu Tahun 2021

No.	Indikator	Capaian 2021
1	Pegelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
	1.1. Rekomendasi perizinan penangkapan Ikan	0%
	1.2. Rekomendasi perizinan pembudidayaan Ikan	0%
	1.3. Rekomendasi perizinan pariwisata alam perairan	0%
	1.4. Rekomendasi perizinan penelitian dan pendidikan	0%
	1.5. Rekomendasi perizinan pendirian dan/atau penempatan bangunan laut	0%
	1.6. Rekomendasi perizinan pemanfaatan air laut selain energi	0%
	1.7. Rekomendasi perizinan transportasi perairan	0%
	1.8. Rekomendasi perizinan pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan	0%
	1.9. Pendidikan konservasi dan Lingkungan Hidup serta penyadartahuan masyarakat	95%
	1.10. Kemitraan dengan masyarakat	99%
	1.11. Pendampingan kelompok masyarakat	97%
	1.12. Tersedia pusat informasi pelestarian kawasan konservasi dan taman laut	95%
	1.13. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis serta prosedur perlindungan pemanfaatan dan perairan konservasi	96%
	1.14. Pelaksanaan perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	98%
	1.15. Perlindungan terhadap aturan zonasi di kawasan konservasi	95%
	1.16. Pelaksanaan Perlindungan terhadap habitat dan jenis ikan serta biota lainnya	99%
2	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	2.1. Pengawasan terhadap aturan zonasi	99%
	2.2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sumber daya kelautan dan perikanan	98%

Sumber: laporan tahunan BPSDKP Wilayah Bima-Dompu 2021

c. Aspek-Aspek Pertimbangan UPTD menerapkan BLUD

UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk didalamnya kawasan konservasi, agar lebih efektif maka diterapkan Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini didukung Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Sistem BLUD ini diterapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dimana UPTD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

Dengan penerapan sistem BLUD, maka fleksibilitas pengelolaan yang diberikan, yaitu:

1. Pengelolaan dana secara langsung dari seluruh pendapatan jasa layanan tahun berjalan;
2. Pengelolaan barang dan/atau jasa;
3. Pengelolaan hutang dan piutang;
4. Pengelolaan investasi jangka pendek;
5. Pengelolaan penerimaan hibah; dan
6. Kerjasama dengan pihak lain.

Salah satu hal penting dari penerapan BLUD tersebut adalah kemandirian dan keberlanjutan pembiayaan agar pelayanan dan pengelolaan Kawasan Konservasi lebih efektif dan memberikan dampak bagi peningkatan kinerja UPTD dan kesejahteraan masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi.

Dengan berlakunya fleksibilitas dalam penerapan BLUD, maka penerimaan UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu, yang berasal dari Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan (TLPJL) dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional dalam rangka pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Selain dari jasa layanan tersebut, sumber pendapatan BLUD berasal dari APBD sebagaimana unit kerja lain di bawah Dinas, penerimaan hibah dari lembaga non pemerintah dan/atau pemberi hibah/donor, dan kerjasama program dengan pihak lain.

Dengan penerapan BLUD pada UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu, maka dimungkinkan untuk menyusun struktur kelembagaan yang lebih luwes untuk mendukung operasional pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk pengelolaan Kawasan Konservasi, sebagaimana terlihat pada struktur organisasi BLUD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Isu Strategis

3.1.1. Analisis SWOT

Analisis SWOT atau *Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats* digunakan untuk menganalisis permasalahan dan isu strategis UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu. *Strengths* dan *Weaknesses* adalah bagian dari analisis internal organisasi, sedangkan *Opportunities* dan *Threats* adalah bagian dari analisis lingkungan eksternal organisasi. Hasil identifikasi komponen analisis SWOT dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Identifikasi SWOT BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu

Kekuatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki zona konservasi yang luas dengan potensi industri kelautan dan wisata yang tinggi; 2. SDM energik dan <i>teamwork</i> yang <i>solid</i>; 3. Kemampuan berkoordinasi dengan <i>stakeholders</i> industri kelautan dan pariwisata relatif baik; 4. Komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan kabupaten berjalan baik; 5. Landasan hukum UPTD dalam pengelolaan zona jelas (masuk sebagai program nasional); 6. Terdapat potensi wisata alam, seni-budaya, dan wisata kuliner; 7. Tersedia pelaku industri pariwisata dalam negeri yang telah beroperasi di wilayah Perairan Bima-Dompu 8. Masyarakat ramah dan terbuka terhadap wisatawan asing. 9. Potensi wilayah perairan kawasan konservasi Bima-Dompu memiliki karakteristik yang langka dan unik; 10. Merupakan wilayah perairan yang menjadi pertemuan tiga arus menjadi kehasan kawasan konservasi Gilibanta merupakan alur ruaya Cetacean (Biota laut yang dilindungi); 11. Sebagai central Breeding Kakap Kerapu;
Kelemahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan kompetensi SDM UPTD belum memadai; 2. Kurangnya peralatan pendukung pengawasan dan perlindungan kawasan; 3. Belum memiliki struktur penerimaan yang tetap dan mencukupi; 4. Zona pemanfaatan belum terkendali secara baik; 5. Lahan yang dapat diusahakan (<i>saleable area</i>) relatif terbatas; 6. Belum ada kajian daya dukung dan daya tarik wisata; 7. Destinasi wisata belum dikembangkan; 8. Program kerja pembangunan kepariwisataan masih parsial terpisah dari program konservasi kelautan; 9. Rendahnya daya dukung infrastruktur daerah; 10. Rendahnya kewirausahaan masyarakat terkait kelautan dan kepariwisataan. 11. Jarak tempuh dari daratan menuju Gilibanta membutuhkan waktu 2 jam menggunakan perahu 12. Rambu-rambu zona kawasan konservasi belum ada
Peluang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan program kawasan konservasi sebagai prioritas Nasional; 2. Dukungan Pemerintah Daerah dan pusat; 3. Kawasan relatif aman; 4. Kerja sama internasional/Donor sangat dimungkinkan untuk pengelolaan Kawasan konservasi; 5. Minat <i>ecotourism</i> masyarakat meningkat; 6. Potensi dan minat investor tinggi; 7. Beberapa objek pariwisata alam relatif telah dikenal oleh wisatawan Internasional terutama minat khusus.
Ancaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaksinkronan perencanaan antarstakeholders, baik di pusat maupun daerah; 2. Pemahaman masyarakat terhadap zonasi Kawasan konservasi tidak sejalan dengan kebiasaan sehari-hari; 3. Dukungan masyarakat adat sangat tergantung isu yang dihadapi; 4. Pembangunan pariwisata akan membebani dan mengancam upaya konservasi;

	5. Akses ke zona pemanfaatan tidak mudah/belum tersedia 6. Rendahnya kesadaran masyarakat nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
--	--

Sumber: Ilustrasi Hasil Analisis Lingkungan Strategis

Hasil analisis kemudian digunakan untuk mengidentifikasi strategi generik yang akan menjadi arah umum organisasi dalam 2 (dua) tahun kedepan (d disesuaikan dengan periode Renstra yang akan disusun)

Dalam kuadran ini strategi umum yang disarankan adalah *Hold and Maintain*, yaitu:

- a. *Market Penetration* (meningkatkan pangsa pasar menggunakan produk/layanan saat ini, di pasar saat ini melalui upaya pemasaran);
- b. *Product Development* (meningkatkan penjualan dengan memperbaiki produk/layanan saat ini, atau mengembangkan produk baru).

Pada UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu, kedua strategi generik ini sangat mungkin untuk digunakan. Sebagai BLUD, UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan layanan baru yang sesuai dengan tugas organisasi, dan mampu mengembangkan penerimaan yang cukup untuk membiayai operasinya secara mandiri.

3.1.2. Sasaran dan Tujuan Strategis

Sasaran adalah hal yang harus organisasi lakukan secara baik untuk mencapai strategi dimaksud. Hasil analisis obyektif dari strategi yang ada, ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 8. Sasaran Strategis BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu

Sasaran	Obyektif
Strategi SO	
1. Menjadikan pengembangan zona konservasi TWP Gilibanta Kabupaten Bima dan SAP Teluk Cempi Kabupaten Dompu merupakan kegiatan prioritas Kabupaten dan provinsi NTB.	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi bagi perlindungan sumber hayati kelautan dan kemanfaatan dunia
2. Pengembangan dan promosi pariwisata alam perairan dalam kerangka <i>eco-tourism</i> dan pariwisata berkelanjutan	a. Membangun zona pemanfaatan secara terpadu berdasarkan prinsip keberlanjutan b. Membangun pariwisata berkelanjutan sesuai standar <i>green/sustainable tourism</i> c. Memanfaatkan media publikasi dan promosi
3. Memastikan pengawasan dan perlindungan zona inti dan perikanan dapat dilakukan melalui kerja sama dan dukungan masyarakat, pemerintah, dan pemberi Hibah (jika ada)	a. Mengawasi kawasan konservasi berjalan efektif b. Membangun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan
Strategi WO	
1. Peningkatan komitmen kepala daerah terhadap zonasi yang dilakukan	a. Memastikan dukungan anggaran Daerah b. Memastikan dukungan RTRW dan zonasi pembangunan dari Daerah c. Membangun infrastruktur dasar (transportasi, air bersih, listrik, kesehatan/keselamatan) di zona pemanfaatan
2. Memastikan perencanaan zonasi dan pemanfaatan dilakukan dengan baik dan profesional dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan penyiapan infrastruktur	a. Menyusun rencana konservasi perairan yang jelas, terintegrasi, dan berstandar internasional b. Pengembangan teknologi informai untuk mendukung perencanaan dan operasional c. Menegakkan zonasi dan panduan pembangunan

Sasaran	Obyektif
3. Mencari dana pengembangan infrastruktur dasar di zona pemanfaatan	a. Proaktif mencari alternatif pembiayaan program ke Pusat b. Membentuk kerja sama dengan pemberi Hibah
Strategi ST	
1. Memastikan penelitian mendukung pengembangan dan pemanfaatan zonasi konservasi yang aman dan berkelanjutan	a. Menyusun panduan pelaksanaan kegiatan penelitian di kawasan b. <i>Feedback</i> hasil dan diseminasi bermanfaat bagi kawasan
2. Pengembangan forum komunikasi dengan masyarakat dan pihak terkait dalam pengembangan zona	a. Membangun rasa memiliki dari masyarakat b. Masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan, perlindungan, dan pemanfaatan
3. Nota kesepahaman dengan <i>stakeholders</i> kepariwisataan	Mengembangkan kerja sama dan jejaring kerja
Strategi WT	
1. Pembatasan pembangunan dan pemanfaatan di zona inti dan perikanan	a. Menegakkan zonasi dan panduan pembangunan b. Membangun ekonomi masyarakat
2. Pendidikan SDM daerah	a. Mengembangkan keterampilan SDM UPTD untuk mendukung pengelolaan Kawasan konservasi b. Mengembangkan pendidikan dan SDM daerah untuk mendukung pengelolaan Kawasan konservasi

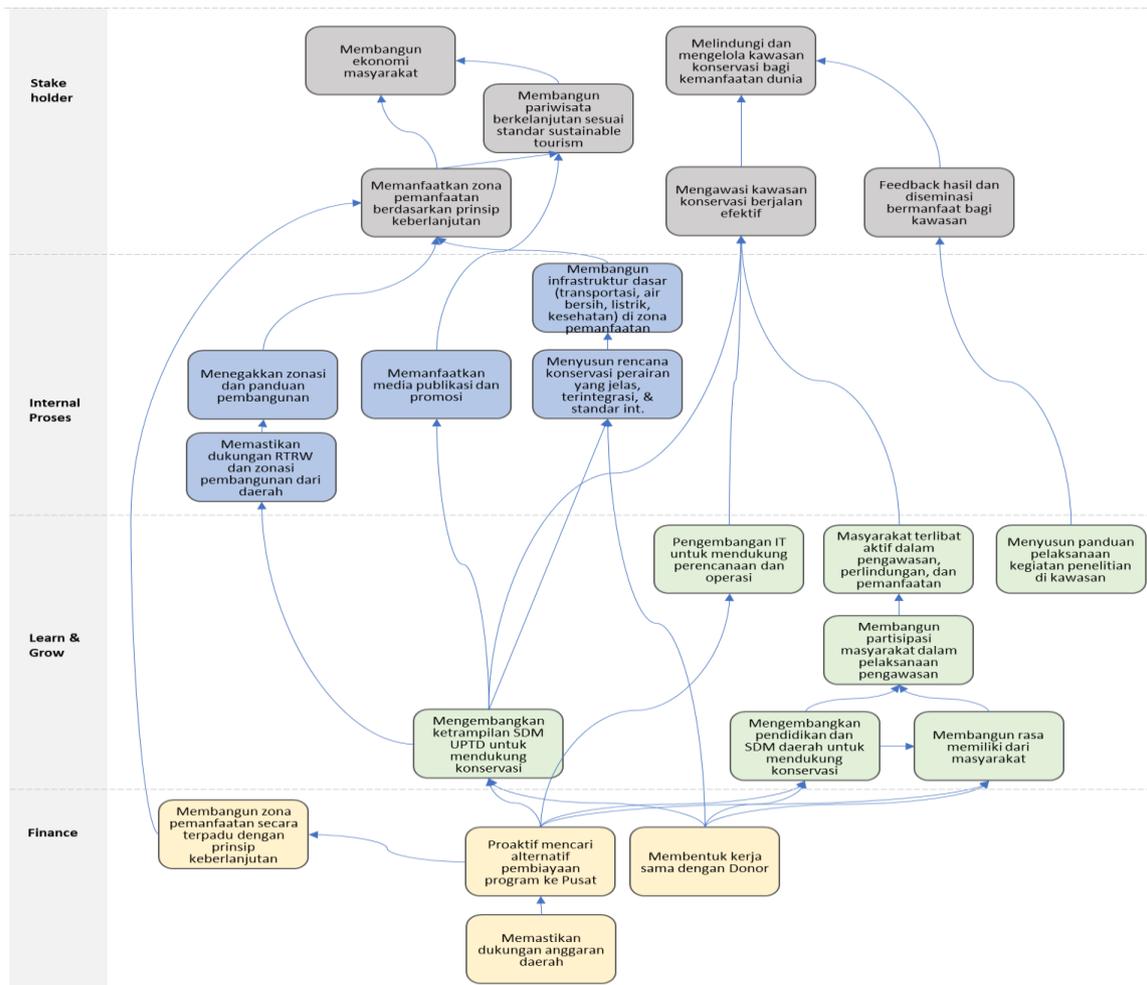
Sumber: Hasil Pengolahan Data

3.1.3. Peta Strategi

Sasaran strategis seperti tersebut diatas kemudian dipetakan dalam peta strategi, yang tergambar dalam bentuk grafik sehingga mudah dipahami. Peta strategi digunakan untuk membantu melihat apakah ada perspektif strategi yang belum memperoleh perhatian yang cukup dalam analisis ini.

Pemetaan dilakukan menggunakan strategi *Stakeholder*, *Internal Business Process*, *Learn and Growth*, serta *Finance*. Keempat perspektif ini diambil dari konsep *Balanced Scorecard* untuk memudahkan pemahaman. Masing-masing sasaran strategis dikategorikan ke dalam keempat perspektif ini. Hasil pemetaan dapat dilihat pada Gambar 3.

Dari pemetaan (Gambar 3) tampak bahwa isu strategis yang dihadapi oleh UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu dalam mencapai tujuannya, antara lain dari segi keuangan, isu utama yang dihadapi adalah menghasilkan penerimaan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan yang dihadapi. Dari segi pertumbuhan, isu utama yang dihadapi adalah mengembangkan SDM dan membina dukungan masyarakat. Dari segi proses internal, isu strategis yang dihadapi adalah menegakkan zonasi dan panduan pembangunan di masing-masing kawasan, menyusun rencana pengelolaan wilayah perairan dan Kawasan Konservasi perairan yang jelas dan terintegrasi, membangun infrastruktur dasar, sarana, dan prasarana, serta memastikan kerja sama yang baik dengan unit kerja yang lain. Dari sisi pemangku kepentingan, isu strategis yang dihadapi adalah meningkatkan kegiatan monitoring, memanfaatkan zona, dan membangun ekonomi masyarakat.



Gambar 3. Peta Strategi BLUD UPTD

Sumber: ilustrasi Hasil Pengolahan Data

3.2. Rencana Pengembangan Layanan

3.2.1. Model Bisnis BLUD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Bima-Dompu

Model bisnis adalah konsep tentang bagaimana semua aspek utama bisnis saling berkaitan satu sama lain. Ini termasuk mengidentifikasi pelanggan dan mitra serta hubungannya terhadap nilai yang diproduksi/diciptakan oleh bisnis yang dimaksud, mengidentifikasi bagaimana pendapatan dihasilkan, serta mengidentifikasi bagaimana produk akan diproduksi/diciptakan dan dipasarkan termasuk biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukannya. Singkatnya, hasil dari model bisnis adalah rencana terperinci tentang bagaimana bisnis beroperasi.

Model Bisnis Kanvas (*Business Model Canvas – BMC*) adalah dokumen satu halaman sederhana yang dipecah menjadi sembilan blok yang bekerja melalui semua elemen fundamental dari model bisnis. Kanvas ini dimaksudkan untuk mempermudah mengartikulasikan dengan lebih baik semua segmen yang berbeda dari model bisnis secara koheren sehingga membuat ide bisnis menjadi lebih jelas bagi para pemangku kepentingan. BMC dikembangkan oleh Alexander Osterwalder selama pekerjaan PhD-nya di *University of Lausanne*.

BMC terdiri dari 9 blok yang diatur dalam 4 area utama: (1) pelanggan; (2)

penawaran; (3) infrastruktur; dan (4) kelangsungan finansial.

1. Pelanggan (*customer*), terdiri dari “*customer segment*”, “*channel*”, dan “*customer relationships*”.
2. Penawaran (*offering*), mencakup “*value proposition*” perusahaan kepada pelanggannya (dan pemangku kepentingan).
3. Infrastruktur (*infrastructure*), terdiri dari “*key partners*”, “*key activities*” yang dilakukan, dan “*key resources*” yang digunakan.
4. Kelangsungan finansial (*finance*), terdiri dari “*revenue stream*” dan “*cost structure*”.

Sisi kanan BMC berfokus pada penyampaian nilai kepada pelanggan sedangkan sisi kiri berfokus pada penciptaan nilai itu. Hasil identifikasi model bisnis BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu adalah sebagai berikut.

1. *Customer Segments* atau Segmen Pelanggan adalah berbagai kelompok orang atau organisasi yang ingin dijangkau dan dilayani oleh bisnis yang dimaksud. Ini termasuk pengguna yang mungkin tidak menghasilkan pendapatan tetapi diperlukan agar model bisnis dapat berfungsi. Hasil identifikasi menunjukkan segmen pelanggan BLUD adalah:
 - a. wisatawan;
 - b. masyarakat di wilayah BLUD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu; dan
 - c. peneliti/komunitas ilmiah.
2. *Value Proposition* atau Proposisi Nilai menjelaskan paket produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk Segmen Pelanggan tertentu. *Value proposition* BLUD adalah:
 - a. perlindungan zona konservasi yang ketat dan tegas;
 - b. pemanfaatan zona berbasis SDA, SDM, dan budaya lokal;
 - c. prinsip pengembangan industri dan pariwisata secara berkelanjutan;
 - d. perencanaan terintegrasi dan berwawasan lingkungan di zona Pemanfaatan;
 - e. lahan *Clean and Clear* (CnC) di zona pemanfaatan yang siap dibangun;
 - f. transparansi dan fasilitasi perizinan;
 - g. sarana prasarana umum, kebersihan, keselamatan pendukung kepariwisataan berstandar internasional;
 - h. pusat komunikasi dan informasi terpadu pariwisata dan potensi di wilayah perairan Pulau Lombok; dan
 - i. produk lokal berkualitas yang dikenal sampai tingkat nasional.
3. *Channels* atau saluran menjelaskan bagaimana berkomunikasi dan menjangkau segmen pelanggan untuk menyampaikan proposisi nilai yang ditawarkan oleh bisnis yang dimaksud. Saluran kepada *customer* BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu. dapat melalui:
 - a. *Website*;
 - b. Iklan promosi media;
 - c. *Travel agents*;
 - d. Forum bisnis;
 - e. Sosial Media;
 - f. Forum komunikasi; dan
 - g. Asosiasi pariwisata
4. *Customer Relationship* atau hubungan pelanggan menjelaskan jenis hubungan yang dibangun dengan segmen pelanggan tertentu. *Customer relationship* BLUD dengan pelanggan adalah:
 - a. partisipasi masyarakat;
 - b. kerja sama

- c. kunjungan perusahaan;
 - d. *tourist and travel event*; dan
 - e. media dan sosial media.
5. *Key Activities* atau aktivitas utama menjelaskan kegiatan yang dilakukan bisnis yang dimaksud agar model bisnis berfungsi. *Key activities* BLUD adalah:
- a. perencanaan dan pengawasan zona inti, zona perikanan, dan zona pemanfaatan.
 - b. penyediaan infrastruktur dasar dan transportasi di zona pemanfaatan
 - c. membangun kerjasama dan jejaring dengan Pemerintah Daerah, pemerintah pusat, pemberi Hibah, investor, dan lembaga pendidikan;
 - d. penyusunan pedoman pembangunan dan pemanfaatan zona perikanan dan zona pemanfaatan;
 - e. dukungan pengurusan perizinan;
 - f. identifikasi potensi kawasan sebagai modal;
 - g. menyusun profil kegiatan kelautan dan pariwisata yang dapat dikembangkan/dikerjasamakan;
 - h. pengembangan industri kelautan dan pariwisata secara partisipatif berdasarkan prinsip berkelanjutan;
 - i. pelatihan ketrampilan masyarakat pendukung industri kelautan dan kepariwisataan;
 - j. membangun sistem promosi dan pemasaran, baik konvensional maupun digital;
 - k. perkuatan branding destinasi wisata bahari;
 - l. forum komunikasi dan koordinasi pengembangan kawasan wisata bahari;
 - m. pembinaan standar layanan akomodasi wisata (hotel, *homestay*, dan restoran di zona pemanfaatan);
 - n. desain destinasi dan rute arus wisatawan;
 - o. fasilitasi dukungan pengembangan dan pemasaran produk dan layanan;
 - p. subsidi pendidikan, beasiswa, SDM lokal untuk kelautan dan pariwisata;
 - q. penjaminan bagi program pembiayaan; dan
 - r. pengembangan rasa memiliki.
6. *Key Resources* atau sumber daya utama menjelaskan aset paling penting yang diperlukan untuk membuat model bisnis dapat berfungsi. *Key resources* BLUD adalah:
- a. Zonasi Kawasan diluar dan dalam kawasan konservasi;
 - b. kekayaan alam;
 - c. SDM;
 - d. aset BMN/D;
 - e. teknologi informai; dan
 - f. pendanaan.
7. *Key Partners* atau mitra utama berisi pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya suatu bisnis. Hubungan dengan *key partners* mempengaruhi suksesnya suatu bisnis karena bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan saja tapi juga dengan pihak yang bersangkutan lainnya seperti pemasok dan tim pemasaran. *Key partners* teridentifikasi adalah:
- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b. K/L terkait (KLH, Kemenparekraf, Kemenhub, Kemen PUPR);
 - c. pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten;
 - d. masyarakat di Wilayah Lombok;
 - e. usaha kecil dan menengah lokal;
 - f. pelaku usaha pariwisata;
 - g. media;

- h. lembaga keuangan;
 - i. lembaga penelitian dan perguruan tinggi;
 - j. pemberi Hibah/donor; dan
 - k. investor.
8. *Revenue Streams* atau arus pendapatan mewakili cara bisnis yang dimaksud dalam menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan. *Revenue streams* BLUD adalah:
- a. pendapatan hibah dari pemberi Hibah/Donor;
 - b. jasa lingkungan;
 - c. jasa manajemen utilitas di zona pemanfaatan;
 - d. jasa kerja sama operasi di zona konservasi;
 - e. pendapatan retribusi; dan
 - f. jasa lainnya.
9. *Cost Structure* atau struktur biaya meliputi biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk membentuk, memproduksi, dan memasarkan Proposisi Nilai bisnis. Dengan pengelolaan biaya yang benar, bisnis yang dijalankan akan menjadi lebih efisien, hemat dan meminimalkan risiko kerugian. *Cost structure* sementara BLUD adalah:
- a. biaya perencanaan dan riset;
 - b. biaya operasi pengawasan dan perlindungan zona konservasi;
 - c. biaya pembangunan zona pemanfaatan;
 - d. biaya operasi zona pemanfaatan;
 - e. biaya promosi dan event;
 - f. biaya Remunerasi Pegawai;
 - g. biaya operasi kantor;
 - h. biaya transportasi dan perjalanan dinas;
 - i. biaya komunikasi dan teknologi informasi;
 - j. biaya pelatihan;
 - k. biaya pertemuan dan koordinasi; dan
 - l. biaya administrasi umum.

Masing-masing blok kemudian dimasukkan ke dalam kanvas untuk membentuk model bisnis kanvas seperti tampak dalam bagan berikut ini. Model bisnis memudahkan analisis lingkungan dan keuangan yang akan dilakukan, karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai layanan dan lingkungan yang dihadapi oleh BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu. Sesuai analisis lingkungan dan isu strategis yang dihadapi, maka arah umum pengembangan BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu adalah:

1. *Product Development*, meningkatkan penjualan dengan memperbaiki produk/layanan saat ini, atau mengembangkan produk baru.

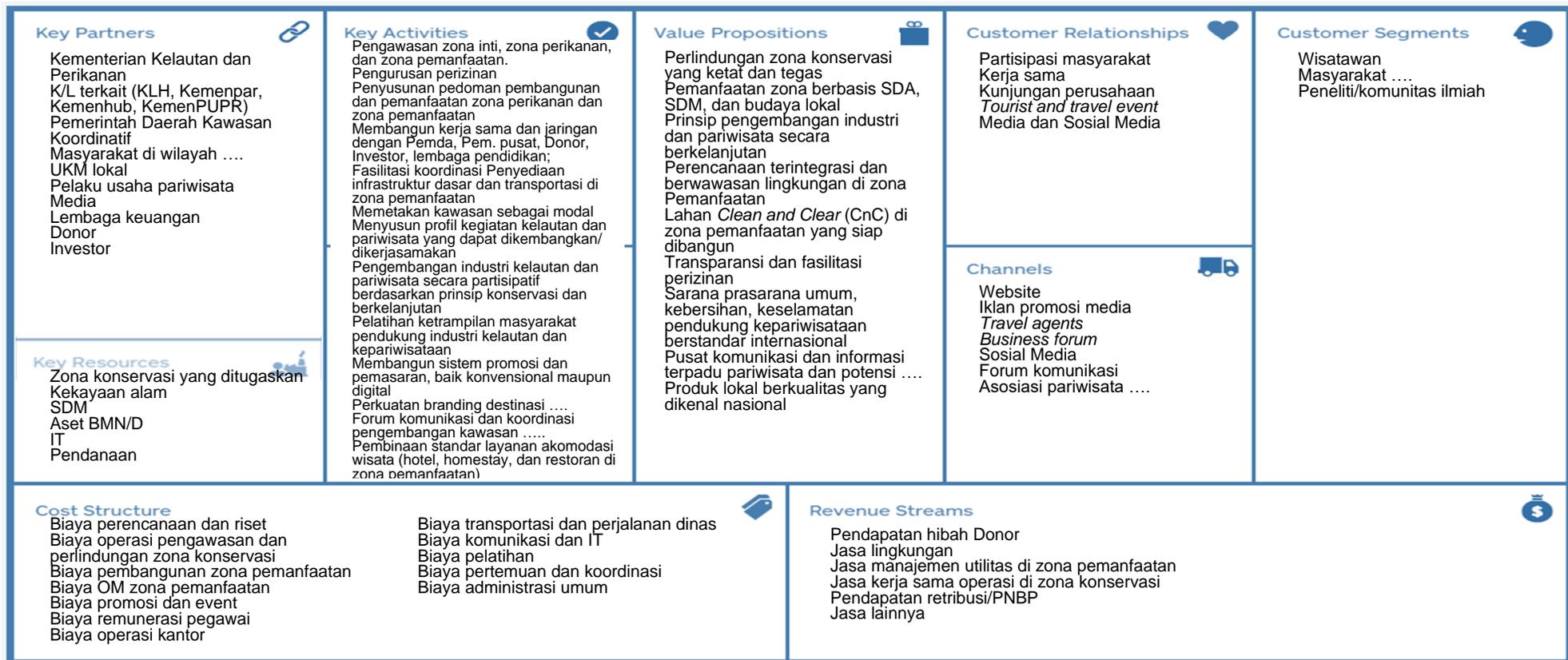
Potensi wisata bahari tergolong menjanjikan di kawasan perairan wilayah Lombok antara lain untuk menyelam, *trekking*, tirta, serta melihat karst. Dari aspek perikanan, perairan menjadi lokasi peneluran ikan terbang serta wilayah pengasuhan tuna dan berbagai jenis ikan kakap merah. Potensi ini bukanlah tanpa ancaman, karena masih terjadi penangkapan ikan secara destruktif dengan menggunakan bom dan sianida, penggunaan kompresor, serta penggunaan jaring rawai (*longline*) sehingga terjadi penangkapan yang berlebihan. Selain itu, masih ada penangkapan hiu secara berlebihan untuk keperluan komersial.

Untuk bisa dapat memanfaatkan potensi-potensi tersebut, UPTD Balai

Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Lombok harus melakukan pengembangan agar potensi dapat memberikan manfaat pada ekonomi masyarakat lokal, membuka lapangan pekerjaan baru, dalam kerangka konservasi perairan. Tanpa alternatif tersebut, masyarakat tidak akan tertarik untuk membantu menjaga Kawasan konservasi yang ada.

2. Market Penetration, meningkatkan pangsa pasar menggunakan produk/layanan saat ini, di pasar saat ini melalui upaya pemasaran. UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Lombok memiliki keuntungan karena berdekatan dengan wilayah wisata perairan Gili Tramen. yang lebih dahulu dikenal secara luas. Kedekatan ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pasar.

Pada BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu maka kedua strategi generik ini sangat mungkin untuk digunakan, sebagaimana dijelaskan di awal, terutama terkait dengan upaya pengembangan usaha untuk pendapatan/penerimaan guna pembiayaan operasional secara mandiri.



Gambar 4. Ilustrasi Model Bisnis Canvas pada BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Sebagai daerah yang berakhir masa pemerintahan kepala daerahnya pada tahun 2023, maka sebagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, pedoman dan acuan dalam penyusunan RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 mengacu kepada dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025. Tertuang visi, misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, serta visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah nasional tahun 2005-2025, sebagaimana diuraikan berikut :

a. Visi

Visi pembangunan Daerah dalam RPD Provinsi NTB tahun 2024-2026 adalah:
"Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Maju dan Sejahtera"

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 ditempuh melalui 5 misi pembangunan daerah yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran hukum
2. Mewujudkan masyarakat sejahtera
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
4. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Untuk mewujudkan misi pada RPJPD 2005-2025, didalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi NTB mengemban tugas untuk melaksanakan sasaran prioritas daerah yaitu :

1. Pembangunan manusia yang KUAT (Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa).
2. Pembangunan lingkungan lestari dan asri
3. Pembangunan kesejahteraan Masyarakat yang mandiri
4. Peningkatan tatakelola pemerintahan daerah
5. Peningkatan komitmen dan capain tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)
6. Peningkatan daya saing daerah dengan kemajuan industrialisasi dan investasi.

Melihat dari Visi, Misi dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026, serta isu strategis aktual dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB yang cukup kompleks dan dinamis maka diperlukan langkah – langkah efektif melalui formulasi penyusunan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu : Meningkatkan kontribusi PDRB sektor perikanan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, yang dilaksanakan melalui sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan
2. Meningkatnya tingkat konsumsi ikan
3. Meningkatnya produksi perikanan
4. Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan
5. Meningkatnya system pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
6. Tersedianya regulasi/kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang efektif
7. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia
8. Terwujudnya birokrasi dinas kelautan dan perikanan yang efektif dan berorientasi pelayanan prima
9. Terkelolanya anggaran pembangunan kelautan dan perikanan secara efisien dan akuntabel

Dalam penetapan rencana strategis pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Bima-Dompu, berdasarkan sasaran – sasaran yang telah

ditetapkan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2014 - 2026, UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu mendukung pencapaian seluruh sasaran pembangunan tersebut dan merumuskan penetapan visi dan misi BLUD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu yang relevan dengan tujuan dan sasaran renstra dinas yang dirancang bersinergi, adaptif, dan akomodatif dengan visi pemerintah Provinsi NTB, serta Renstra Dinas. Visi BLUD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu mengacu dan menggabungkan kedua visi kawasan konservasi di atas dengan pandangan yang berorientasi terhadap masa depan dan didasarkan pada nilai dan prinsip penghargaan pada masyarakat.

Visi BLUD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu adalah:

“Terwujudnya Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu Yang Lestari, Melalui Pengelolaan Yang Mandiri Dan Berkelanjutan”

Mengacu pada visi tersebut, Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Bima-Dompu dilakukan dengan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis ekosistem dan adat yang memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan dengan mempertahankan jasa-jasa ekosistem yang dibutuhkan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya perikanan, ketahanan pangan, pariwisata alam dan industri kelautan yang berkelanjutan. Visi diatas merepresentasikan sebuah tata kelola pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai sarana untuk mempertahankan sumber daya perairan dan pemanfaatan jasa-jasa ekosistem secara berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat sekitar yang berada di wilayah Bima-Dompu

Adapun Misi BLUD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Bima-Dompu, yaitu:

1. Melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, sumber daya perikanan dan ekosistem perairan dengan mengatur penggunaan dan pemanfaatan SDKP melalui pengendalian dan pengawasan seluruh kawasan perairan yang ada di Wilayah Bima-Dompu.
2. Memanfaatkan potensi sumber daya perairan dan jasa-jasa lingkungan melalui pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan secara berkelanjutan dan memperhatikan ketahanan pangan masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM Pegawai BLUD, institusi lokal (adat) dan masyarakat untuk secara efektif bekerjasama dalam mengelola sumber daya dan jasa kelautan.

Misi tersebut dimaksudkan untuk merangsang daya saing BLUD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Bima-Dompu dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya kelautan, pesisir dan PPK serta pedoman bagi Pegawai untuk memahami tujuan pengelolaan.

3.3. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Bima-Dompu

Dengan merujuk pada materi teknis RZWP3K, pengelolaan wilayah perairan dan kawasan konservasi adalah “menjamin tersedianya sumber daya perairan untuk menopang kehidupan sosial masyarakat (ketahanan pangan) secara berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman jenis, habitat, dan ekosistem”.

Tujuan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Bima-Dompu adalah sebagai berikut:

1. Terkelolanya Kawasan Konservasi dengan sistem zonasi sesuai peruntukannya dengan menggunakan prinsip pengelolaan berbasis ekosistem dan adat secara

- efektif, efisien, dan adaptif untuk mempertahankan dan menjamin keberlanjutan keanekaragaman hayati dan ekosistem pesisir dan laut.
2. Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan melalui pemanfaatan potensi sumber daya perairan dan jasa-jasa lingkungan.
 3. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (masyarakat lokal dan pengelola), serta penguatan kelembagaan untuk mencapai pendanaan dan pengelolaan yang berkelanjutan.
 4. Terbangun kemitraan dan kerja sama program secara kolaboratif dalam pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi dengan pihak NGO di Wilayah Bima-Dompu

Sasaran umum pengelolaan wilayah perairan dan Kawasan Konservasi Bima-Dompu meliputi wilayah perairan laut 0 – 12 mil di TWP Gilibanta Kabupaten Bima dan SAP Teluk Cempi Kabupaten Dompu yang disesuaikan dengan karakteristik biofisik dan sosial masyarakatnya.

Sasaran Pengelolaan wilayah perairan dan Kawasan Konservasi Gilibanta dan Teluk Cempi, sebagai berikut:

1. Keanekaragaman jenis, habitat, dan ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove, daerah aliran sungai, danau, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah pengelolaan wilayah perairan dan Kawasan Konservasi.
2. Lokasi-lokasi pemijahan ikan (*fish spawning aggregation*),
3. Masyarakat adat dan masyarakat petuanan serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (seperti Sasi).

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan

4.2.1. Strategi Alternatif

Dari hasil analisis SWOT, yang kemudian dimasukkan ke dalam Matriks TOWS, akan terlihat strategi alternatif yang dapat diambil oleh organisasi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, untuk berhadapan dengan peluang dan tantangan dari luar organisasi. Strategi alternatif dimaksud, yaitu:

- a. Strategi S-O, adalah strategi yang dipilih untuk menggunakan Kekuatan organisasi agar dapat memanfaatkan peluang yang ada;
- b. Strategi W-O, adalah strategi untuk mengurangi kekurangan organisasi sehingga tidak menutupi peluang yang ada;
- c. Strategi S-W, adalah strategi memanfaatkan kekuatan organisasi untuk menghadapi atau menghindari ancaman;
- d. Strategi W-T, adalah strategi melindungi kelemahan organisasi agar tidak dihabisi oleh ancaman yang dihadapi.

Gambaran strategi alternatif SO, ST, WO, dan WT sesuai matriks TOWS untuk BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 41. Matriks TOWS Alternatif Strategi BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu

		Kekuatan	Kelemahan
		1. Memiliki zona konservasi yang luas dan berpotensi industri kelautan dan wisata yang tinggi 2. SDM energik dan <i>teamwork</i> yang solid	1. Jumlah dan kompetensi SDM UPTD belum memadai 2. Peralatan pendukung pengawasan dan perlindungan terbatas

		Kekuatan	Kelemahan
		3. Kemampuan berkoordinasi dengan <i>stakeholders</i> industri kelautan dan pariwisata relatif baik 4. Komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan kabupaten berjalan baik 5. Landasan hukum UPTD dalam pengelolaan zona jelas (dan masuk program nasional) 6. Potensi wisata alam, seni-budaya, dan wisata kuliner 7. Ikon wilayah relatif telah dikenal secara Nasional 8. Pelaku industri pariwisata dalam negeri banyak telah beroperasi di 9. Masyarakat relatif ramah dan terbuka terhadap turis asing	3. Belum memiliki struktur penerimaan yang tetap dan mencukupi 4. Zona pemanfaatan belum dipetakan secara baik 5. Lahan yang dapat diusahakan (<i>saleable area</i>) relatif sedikit 6. Belum ada kajian daya dukung dan daya tarik wisata; 7. Destinasi wisata belum dikembangkan 8. Program kerja pembangunan kepariwisataan masih parsial per daerah 9. Daya dukung infrastruktur daerah rendah 10. Kewirausahaan masyarakat terkait kelautan dan kepariwisataan rendah
Pe lu an g	1. Penetapan program kawasan konservasi sebagai prioritas Nasional 2. Dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat 3. Kawasan relatif aman 4. Kerja sama internasional/pemberi Hibah sangat dimungkinkan untuk pembangunan zona konservasi 5. Minat <i>ecotourism</i> meningkat 6. Pembatasan perjalanan ke luar negeri dalam masa pandemi 7. Tingginya potensi dan minat investor	Strategi S-O a. Menjadikan pengembangan zona Kawasan konservasi TWP Gilibanta dan SAP Teluk Cempi sebagai kegiatan prioritas kabupaten di provinsi NTB b. Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan c. Pembentukan dan pengembangan jejaring kerja UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu d. Pengembangan kolaborasi pengelolaan UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu e. Pengembangan dan promosi pariwisata alam perairan dalam kerangka <i>ecotourism</i> dan pariwisata berkelanjutan f. Sosialisasi dan publikasi g. Memastikan pengawasan dan perlindungan zona inti dan perikanan dapat dilakukan melalui kerja sama dan dukungan pemerintah pusat dan donor (jika ada)	Strategi W-O a. Peningkatan komitmen kepala daerah terhadap zonasi yang dilakukan b. Memastikan perencanaan zonasi dan pemanfaatan dilakukan dengan baik dan profesional dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan penyiapan infrastruktur c. Mencari dana pengembangan infrastruktur dasar di zona pemanfaatan d. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan e. Pemanfaatan jasa lingkungan
An ca m an	1. Ketidaksinkronan perencanaan <i>stakeholders</i> , baik di Pusat maupun daerah	Strategi S-T a. Memastikan penelitian mendukung sinkronisasi pengawasan, perlindungan,	Strategi W-T a. Pemberdayaan masyarakat sekitar Kawasan Konservasi

		Kekuatan	Kelemahan
	2. Pemahaman masyarakat terhadap zona konservasi tidak sejalan dengan kebiasaan sehari-hari 3. Pembangunan pariwisata akan mengancam kehidupan konservasi 4. Status dan akses ke zona pemanfaatan	pengembangan dan pemanfaatan zona konservasi yang aman dan berkelanjutan b. Program penelitian dan pengembangan c. Pengembangan forum komunikasi dengan masyarakat dan pihak terkait dalam pengembangan zona d. Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan berbasis adat e. perlindungan habitat dan populasi ikan f. Monitoring evaluasi (monev) sumber daya kawasan g. Nota kesepahaman dengan dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata di zona pemanfaatan	b. Peningkatan kapasitas organisasi pengelola c. Penyusunan panduan spesifikasi pembangunan dan pemanfaatan yang ketat d. Pengurusan perizinan yang transparan, teliti, dan tepat waktu e. Program pendidikan lingkungan hidup f. Mengembangkan sumber pendapatan organisasi yang sesuai ketentuan dan tujuan g. Rehabilitasi habitat yang telah rusak yang tidak mungkin pulih tanpa intervensi

Sumber: Hasil Pengolahan Data

4.2.2. Strategi Pengelolaan

Memperhatikan hasil pengembangan strategi yang disampaikan dalam tabel 4-1 di atas, tampak bahwa untuk mewujudkan visi pengelolaan UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu, dirancang berbagai strategi untuk dapat menysasar tujuan pelestarian sumber daya laut di kawasan perairan wilayah Bima-Dompu. Strategi pengelolaan sesuai dengan Pasal 6 Permen KP Nomor PER.30/MEN/2010 yang menyebutkan bahwa strategi pengelolaan meliputi:

1. Penguatan kelembagaan
2. Penguatan pengelolaan sumber daya kawasan
3. Penguatan sosial ekonomi dan budaya.

Selanjutnya penyusunan Rencana Pengelolaan UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu. perlu memperhatikan kepatuhan (*compliance*) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Keputusan Dirjen juga menjadi rambu-rambu dalam menentukan program kegiatan dan menjadi bahan untuk penyusunan monitoring dan evaluasi penilaian dalam operasionalisasi manajemen BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu ke depan sehingga bisa tercapai pengelolaan yang optimal. Beberapa strategi utama yang diperhatikan dan perlu dilakukan, adalah:

1. Strategi Penguatan Kelembagaan

Strategi penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas struktur dan infrastruktur kelembagaan. Strategi ini dimulai dari proses pemantapan kelembagaan UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu, penerapan BLUD sampai pada pengembangannya ke depan, melalui upaya dan proses peningkatan kapasitas (*capacity building*) pengelola dan masyarakat di sekitar wilayah pengelolaan UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu

Strategi penguatan kelembagaan, meliputi peningkatan kapasitas organisasi pengelola UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu, pengembangan sarana dan

prasarana, pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan berbasis adat, pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan, pengembangan kolaborasi pengelolaan wilayah perairan dan Kawasan Konservasi di Bima-Dompu, pembentukan dan pengembangan jejaring Kawasan Konservasi, sosialisasi dan publikasi, serta monitoring evaluasi (monev).

2. Strategi Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan

Strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan mencakup dua sumber daya penting, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk mengimplementasikan strategi ini dikembangkan program penelitian dan pengembangan, perlindungan habitat dan populasi ikan, rehabilitasi habitat yang telah rusak yang tidak mungkin pulih tanpa intervensi, pemanfaatan jasa lingkungan, dan monev sumber daya kawasan.

Selain sumber daya ekosistem terumbu karang, pengelolaan wilayah perairan dan Kawasan Konservasi Bima-Dompu, memberikan perhatian khusus pada pengelolaan ekosistem mangrove dan padang lamun. Kedua ekosistem ini memiliki peran penting dalam menyediakan jasa lingkungan, termasuk sebagai pengatur iklim global dalam konteks perubahan iklim. Ekosistem mangrove dan padang lamun diakui memiliki kandungan karbon yang cukup signifikan, baik pada batang pohon dan daunnya (*above the ground*) maupun pada sedimennya (*below the ground*). Dengan menjaga kedua ekosistem tersebut dari kegiatan konversi/perubahan lahan, maka dengan sendirinya tidak ada emisi karbon yang dihasilkan. Strategi ini dikenal dengan *blue carbon* dan BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim global.

3. Strategi Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya

Strategi ini mencakup program pendidikan lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah perairan dan Kawasan Konservasi Bima-Dompu, dan monev penguatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar kawasan.

4.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pengembangan BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu adalah:

1. Pengelolaan Berbasis Ekosistem dan Adat

Arah pengelolaan wilayah perairan dan Kawasan Konservasi Bima-Dompu dilakukan dengan cara menyelaraskan/ mensinergikan pengelolaan berbasis ekosistem (*Ecosystem Based Management*) dan pengelolaan berbasis adat (*Customary Based Management*). Hal ini tidak lain karena tingginya keunikan, keanekaragaman jenis flora dan fauna serta ekosistem perairan, pesisir dan laut Wilayah Bima-Dompu.

Untuk itu, BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu perlu dikelola secara efektif dan efisien secara berkelanjutan oleh pengelola maupun berkolaborasi dengan masyarakat adat dan pemerintah Kota Bima, kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis ekosistem dan adat dalam kerangka melestarikan keanekaragaman hayati laut, mempertahankan stok dan biomassa ikan serta mengembangkan mata pencaharian berkelanjutan (*sustainable livelihood*) dan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) jangka panjang bagi masyarakat di wilayah Bima-Dompu.

Jadi arah kebijakan pengelolaan menggunakan pendekatan yang bertujuan mempertahankan aliran jasa-jasa ekosistem (*ecosystem services*) yang disesuaikan dan disinergikan dengan petuanan di setiap wilayah pengelolaan BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu.

2. Pengelolaan Berbasis Zonasi

Wilayah perairan dan Kawasan Konservasi Bima-Dompu dikelola berdasarkan sistem zonasi. Pengembangan sistem zonasi bertujuan untuk membentuk dan melindungi kawasan konservasi perairan dan mempertahankan fungsi reproduksi dan stok ikan baik di laut, sungai maupun danau air asin sebagai satu kesatuan pengelolaan kawasan perairan. Selain itu, dimaksudkan bagi pengembangan sosial ekonomi masyarakat yang dimanfaatkan secara lestari, dan untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta mengembangkan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) di dalamnya sebagai bentuk pemanfaatan lestari (*sustainable use*) melalui pariwisata bahari dan budidaya laut (*marine culture*) berkelanjutan. Harapan akhir dari pengembangan sistem zonasi Kawasan Konservasi Bima-Dompu adalah untuk memastikan bahwa perairan pesisir dan laut dengan segala sumber daya hayati yang ada didalamnya dapat menjamin ketersediaan sumber daya alam secara kontinyu guna pemenuhan kesejahteraan masyarakat secara luas dan manfaat ekonomi jangka panjang.

3. Regulasi

Kebijakan pengelolaan Wilayah perairan dan Kawasan Konservasi Bima-Dompu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak lain adalah sebagai bentuk kepatuhan (*compliance*) terhadap regulasi yang ada, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 60/2007, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020, serta peraturan di tingkat daerah lainnya yang relevan.

4. Pengelolaan Kolaboratif

Pembangunan dan pengelolaan wilayah perairan dan Kawasan Konservasi Bima-Dompu dapat pula dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan lintas sektoral, swasta, perguruan tinggi, masyarakat adat dan lembaga-lembaga penelitian lainnya. Selain itu, dapat dilakukan pula dengan membangun jejaring kawasan konservasi perairan di wilayah Bima-Dompu sebagai kawasan konservasi dan wilayah segitiga terumbu karang dunia.

Tabel 42. Strategi dan Kebijakan BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Menjamin tersedianya sumber daya perairan untuk menopang kehidupan sosial masyarakat (ketahanan pangan) secara berkelanjutan dan terlindunginya keanekaragaman jenis, habitat, dan ekosistem	1. Menjaga keanekaragaman jenis, habitat, dan ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove, daerah aliran sungai, danau, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah pengelolaan Kawasan Konservasi Gilibanta dan Teluk Cempi	1. Program penelitian habitat dan ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove, DAS, pesisir, dan pulau kecil	1. Mendorong dan memfasilitasi penelitian habitat dan ekosistem
		2. Pengawasan dan perlindungan habitat dan populasi ikan,	2. Menetapkan peraturan dan panduan pembangunan dan pemanfaatan
		3. Rehabilitasi habitat yang telah rusak yang tidak mungkin pulih tanpa intervensi,	3. Menetapkan intervensi pemulihan bertahap
		4. Peningkatan kapasitas organisasi pengelola BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu	4. Menetapkan anggaran peningkatan kapasitas SDM UPTD
		5. Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan UPTD	5. Menetapkan anggaran

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		BPSDKP Wilayah Bima-Dompu	peningkatan sarana prasarana
		6.Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu,	6.Mengembangkan kawasan otoritatif di zona pemanfaatan
		7.Pengembangan kolaborasi pengelolaan UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu dengan NGO,	7.Menetapkan kerja sama donor
		8.Pembentukan dan pengembangan jejaring kerja UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu	8.Mengembangkan kerja sama jejaring kerja dengan kementerian/ lembaga terkait
	2.Menjaga lokasi-lokasi pemijahan ikan (<i>fish spawning aggregation</i>),	1.Program penelitian dan pengembangan lokasi pemijahan ikan	1.Mendorong dan memfasilitasi penelitian pemijahan ikan
		2.Pengawasan dan perlindungan habitat dan lokasi pemijahan ikan	2.Menetapkan peraturan dan panduan pembangunan dan pemanfaatan kawasan
	3.Menjaga masyarakat adat dan masyarakat petuanan serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (Sasi).	1.Program penelitian dan pengembangan masyarakat adat	1.Memfasilitasi penelitian masyarakat adat
		2.Pemanfaatan jasa lingkungan	2.Mengoptimalkan jasa lingkungan
		3.Program pendidikan lingkungan hidup	3.Menganggarkan dan bekerjasama bidang pendidikan lingkungan hidup
		4.Pemberdayaan masyarakat sekitar Kawasan Konservasi Gilibanta dan Teluk Cempi	4.Mengembangkan lapangan kerja alternatif bagi masyarakat
		5.Monev penguatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat	5.Melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak masyarakat
		6.Sosialisasi dan publikasi	6.Menetapkan kerja sama sosialisasi dan publikasi kawasan perairan Gilibanta dan Teluk Cempi
		7.Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan berbasis adat	7.Berkolaborasi dan bermitra dengan masyarakat adat

BAB V

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Program dan Indikator

Memperhatikan peta strategi dan tujuan strategi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka secara umum ada 2 (Dua) program yang akan dilaksanakan oleh BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu dalam 3 (tahun) tahun kedepan, yaitu:

1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
2. Program pengawasan SDKP

Tabel. 4.3 Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan BLUD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan + Sub Kegiatan (Kepmen 050/2021)	Indikator Kinerja Tujuan, Saran, Program (outcome) dan Kegiatan Output	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat daerah penanggungjawab
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya kontribusi PDRB sektor perikanan dan kesejahteraan masyarakat Dan pendapatan sebanyak - banyaknya dengan pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip A	Nilai	A	547.639.000	A	517.865.000	A	501.865.000	1	501.865.000	
		3.25.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Yang tersusun	Paket	1	33.000.000	1	43.000.000	1	43.000.000	1	43.000.000	
		3.25.01.1.01.01	SubKegiatan penyusunan dokumen perencanaan program, evaluasi dan evaluasi kinerja	Penyusunan dokumen Renstra dan Renja	Paket	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	
		3.25.01.1.01.06	SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BLUD	Jumlah Dokumen Lakip yang tersusun	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
		3.25.01.1.01.07	SubKegiatan Evaluasi Kinerja BLUD	Jumlah Laporan Hasil Monev yang tersusun	Tahun	1	-	2 OB	10.000.000	2 OB	10.000.000	2 OB	10.000.000	
		3.25.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang tersusun	Paket	1	132.600.000	1	137.600.000	1	137.600.000	1	137.600.000	
		3.25.01.1.02.01	SubKegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN	Jumlah Non ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Bulan	12	117.600.000	12	117.600.000	12	117.600.000	12	117.600.000	
		3.25.01.1.02.05	SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BLUD	jumlah laporan keuangan akhir tahun	paket	1	7.500.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
		3.25.01.1.02.07	SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran BLUD	Laporan keuangan yang tersusun	paket	1	7.500.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
			Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersusnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	paket	1	7.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
	SubKegiatan Perencanaan Pengelolaan Pendapatan BLUD	Laporan Perencanaan pendapatan BLUD	Paket	1	1.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000			

			SubKegiatan Analisa dan Pengembangan Pendapatan BLUD, serta Penyusunan Kebijakan Pendapatan BLUD	Laporan pengelolaan pendapatan	Paket	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	
			SubKegiatan Pelaporan Pengelolaan Pendapatan BLUD	Laporan pendapatan yang tersusun	paket	1	1.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
	3.25.01 .1.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang terlatih	persen	100	16.500.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	
			SubKegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang terlatih	Orang	2	16.500.000	3	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	paket	1	285.000		285.000		5.285.000		5.285.000	
			SubKegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Perencanaan Laporan BMD yang tersusun	paket	-	-	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	
			SubKegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan BMD yang tersusun	paket	1	285.000	1	285.000	1	285.000	1	285.000	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	paket	1	16.254.000	1	34.980.000	1	34.980.000	1	34.980.000	
			SubKegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah barang peralatan rumahtangga yang tersedia	tahun	1	1.440.000	1	1.680.000	1	1.680.000	1	1.680.000	
			SubKegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bahan logistik kantor yang tersedia	tahun	1	2.800.000	1	2.800.000	1	2.800.000	1	2.800.000	
			SubKegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BLUD)	bahan logistik kantor yang tersedia	tahun	1	2.514.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
			SubKegiatan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang tersedia	tahun	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	
			SubKegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang tersedia	paket	1	2.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
			SubKegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan/atau BLUD (BLUD)	Rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	paket	1	5.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	

			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	tahun	1	78.500.000	1	20.000.000	-	-	1	20.000.000	
			SubKegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	paket	3	78.500.000	-	-	-	-	3	78.500.000	
			SubKegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	paket	-	-	1	20.000.000	-	-	1	20.000.000	
		3.25.01 .1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	paket	1	248.500.000	1	249.000.000	1	246.000.000	1	246.000.000	
		3.25.01 .1.08.0 1	SubKegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang tersedia	tahun	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	
		3.25.01 .1.08.0 1	SubKegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BLUD)	Jasa surat menyurat yang tersedia	tahun	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	
		3.25.01 .1.08.0 2	SubKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BLUD)	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	tahun	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
		3.25.01 .1.08.0 2	SubKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	tahun	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
			SubKegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	1	2.500.000	1	3.000.000	-	-	1	3.000.000	
		3.25.01 .1.08.0 4	SubKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	paket	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		tahun	1	15.000.000		20.000.000		22.000.000		22.000.000	
			SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BMD yang terpelihara	tahun	1	5.000.000		-	1	2.000.000	1	2.000.000	
			SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BLUD)	Jumlah BMD yang terpelihara	tahun	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	

	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Paket	1	1.984.460.000	1	644.500.000	1	493.000.000	1	493.000.000	
	3.25.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas ruang laut dan pesisir yang terkelola	Paket	1	1.742.000.000	1	221.500.000	1	70.000.000	1	70.000.000	
	3.25.02.1.01.02	SubKegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri	paket	1	1.742.000.000	1	221.500.000	1	70.000.000	1	70.000.000	
	3.25.02.1.03	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir yang terfasilitasi	paket	1	242.460.000	1	423.000.000	1	423.000.000	1	423.000.000	
		SubKegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		tahun	1	60.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	
		SubKegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		bulan	12	90.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	
		SubKegiatan Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		bulan	12	92.460.000	12	153.000.000	12	153.000.000	12	153.000.000	
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	paket	1	745.786.000	1	320.786.000	1	290.786.000	1	290.786.000	
	3.25.05.1.01	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha yang diperiksa	paket	1	745.786.000	1	320.786.000	1	290.786.000	1	290.786.000	
	3.25.05.1.01.01	SubKegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah operasi	paket	1	140.786.000	1	140.786.000	1	140.786.000	1	140.786.000	

		3.25.05 .1.01.0 2	SubKegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang terawasi	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
		3.25.05 .1.01.0 4	SubKegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah pokmaswas yang terbina	paket	6	600.000.000	5	175.000.000	4	140.000.000	4	140.000.000	

4.2. Pendapatan BLUD UPTD

Pendapatan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu antara lain bersumber dari jasa layanan, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat pemanfaat Kawasan Konservasi untuk Penelitian Komersial dan Pendidikan, Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan, Persetujuan Penangkapan Ikan yang Bukan untuk Tujuan Komersial Dalam Rangka Kesenangan dan Wisata, Perizinan Berusaha Terkait Pemanfaatan Di Laut, Dalam kaitan itu, akan diberlakukan pengenaan tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat pemanfaat.

Tarif Layanan dimaksud disusun atas dasar harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan/unit layanan, hasil per investasi dana oleh BLUD selama periode tertentu dan perhitungan/penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Tarif Layanan berupa besaran tarif (nilai nominal uang) dan/atau pola tarif (persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih).

Selain itu, Pendapatan dapat pula berasal dari sumber lain yang sah melalui pengembangan usaha. Pengembangan usaha ini dilakukan melalui pembentukan unit usaha di bawah BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu Kawasan Konservasi.

Penerimaan BLUD dapat berasal dari APBD, Tarif Jasa Lingkungan yang dikenakan kepada pemanfaat kawasan, wisatawan yang mengunjungi kawasan, pinjaman, hibah, dan penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat. Proyeksi penerimaan sebagai berikut:

Tabel 44. Rekapitulasi Proyeksi Penerimaan BLUD Tahun 2023-2026

Biaya	2023	2024	2025	2026
Dana Tarif Layanan Pemeliharaan Lingkungan		632.950.000	805.900.000	968.050.000
Hibah <i>Blue</i> Abadi				
Hibah dari sumber lain (Hibah)				
Dana APBD Provinsi	1.860.345.000	2.704.025.000	677.445.000	479.945.000
Pendapatan Lain-lain				
Total Penerimaan	1.860.345.000	3.336.975.000	1.483.345.000	1.447.995.000

Sumber : DPA 2023 dan Renstra Dinas 2023-2026

Dalam rencana strategi 4 (empat) tahun ke depan, kondisi keuangan BLUD UPTD masih defisit. Untuk itu penerimaan jasa lingkungan dan kerja sama pemanfaatan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu dalam melaksanakan kegiatan dan program-programnya.

BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis digunakan sebagai acuan bagi pengelola dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mengelola dan melindungi ekosistem perairan dan jasa-jasa lingkungannya. Penerapan BLUD pada UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu diharapkan dapat meningkatkan kinerja layanan dengan didukung adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran.

Terlaksananya Renstra ini, perlu mendapat dukungan dari setiap pegawai dan partisipasi masyarakat, serta dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materiil, administratif maupun politis.

Renstra ini menjadi dasar bagi penyusunan dokumen Rencana Bisnis Anggaran BLUD dan digunakan oleh UPTD BPSDKP Wilayah Bima-Dompu dalam melaksanakan pelayanan sebagai upaya mencapai target kinerja layanan dan manajemen UPTD yang efektif, efisien dan berkualitas dan berkelanjutan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1. Rencana Strategis BLUD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu

TUJUAN: menjamin tersedianya sumber daya perairan untuk menopang kehidupan sosial masyarakat (ketahanan pangan) secara berkelanjutan dan terlindunginya keanekaragaman jenis, habitat, dan ekosistem.

Tujuan	Sub-Tujuan	Indikator Tujuan
1. Menjamin tersedianya sumber daya perairan untuk menopang kehidupan sosial masyarakat (ketahanan pangan) secara berkelanjutan dan terlindunginya keanekaragaman jenis, habitat, dan ekosistem	1. Mengelola wilayah Kawasan Konservasi dengan sistem zonasi sesuai peruntukannya dengan menggunakan prinsip pengelolaan berbasis ekosistem dan adat secara efektif, efisien, dan adaptif.	1. Proporsi pelanggaran peruntukan zonasi
		2. Pencemaran perairan
		3. Status lamun
		4. Status mangrove
		5. Status terumbu karang
		6. Status produktivitas Estuari
		7. Habitat penting (<i>spawning ground, nursery ground, feeding ground</i>).
		8. Perubahan iklim terhadap SDI dan Nelayan
		9. Sebaran ukuran ikan
		10. Komposisi spesies dan <i>tropic level</i>
		11. Tingkat Kematangan gonad
		12. Densitas/Biomassa untuk ikan karang & invertebrata
		13. Indikator spesies
		14. <i>Trend</i> CPUE
		15. Waktu tempuh lokasi penangkapan ikan
		16. <i>Fishing capacity</i> .
		17. Selektivitas alat tangkap
		18. Metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif dan atau ilegal
		19. Kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal
		20. Modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan.
		21. Sertifikasi awak kapal perikanan sesuai dengan peraturan.
2. Menerapkan peraturan dan perundang-undangan dalam wilayah pengelolaan Kawasan Konservasi sebagai upaya untuk mempertahankan dan menjamin keberlanjutan keanekaragaman hayati dan ekosistem perairan.	1. Proporsi usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam, atau penelitian dan pendidikan yang beroperasi tanpa izin	1. Jumlah perizinan yang dikeluarkan tepat waktu
		2. Jumlah perizinan yang dikeluarkan tepat waktu
3. Meningkatnya kemakmuran dan	1. Pendapatan riil rumah tangga (RTP)	

Tujuan	Sub-Tujuan	Indikator Tujuan	
	kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya perairan dan jasa-jasa lingkungan.	2. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	
		3. <i>Saving rate</i>	
		4. Kepemilikan aset	
	4. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (masyarakat lokal dan pengelola) penguatan kelembagaan untuk mencapai pendanaan dan pengelolaan yang berkelanjutan.		1. Partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan.
			2. Konflik perikanan
			3. Pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan (termasuk di dalamnya <i>traditional ecological knowledge</i> (TEK))
			1. Keberadaan /Kecukupan Kelembagaan
			2. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan
			3. Mekanisme kelembagaan
			4. Kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan (regulasi)
		5. Rencana Pengelolaan Perikanan (Alat)	
		6. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan baik secara formal maupun non-formal (Alat)	

SASARAN: Menjaga keanekaragaman jenis, habitat, dan ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove, daerah aliran sungai, danau, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah pengelolaan Kawasan Konservasi

No	Indikator Sasaran
1.	Pencemaran perairan
2.	Status lamun
3.	Status mangrove
4.	Status terumbu karang
5.	Status produktivitas Estuari
6.	Habitat penting (<i>spawning ground, nursery ground, feeding ground</i>).
7.	Perubahan iklim terhadap SDI dan Nelayan
8.	Komposisi spesies dan <i>tropic level</i>
9.	Densitas/Biomassa untuk ikan karang & invertebrata
10.	Metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif dan atau ilegal
11.	Kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal

SASARAN: Menjaga lokasi-lokasi pemijahan ikan (*fish spawning aggregation*)

No	Indikator Sasaran
1.	Sebaran ukuran ikan
2.	Tingkat kematangan gonad
3.	Indikator spesies
4.	<i>Trend CPUE</i>
5.	Waktu tempuh lokasi penangkapan ikan
6.	<i>Fishing capacity</i>
7.	Selektivitas alat tangkap
8.	Modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan.
9.	Sertifikasi awak kapal perikanan sesuai dengan peraturan.

SASARAN: Menjaga masyarakat adat dan masyarakat petuanan serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (Sasi)

No	Indikator Sasaran
1.	Pendapatan riil rumah tangga (RTP)
2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)
3.	<i>Saving rate</i>
4.	Kepemilikan aset
5.	Partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan.
6.	Konflik perikanan
7.	Pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan (termasuk di dalamnya <i>traditional ecological knowledge (TEK)</i>)